

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI (Periode Tahun 2019-2020)

Muh Nasrullah Ramadhan, Shiddiq Nur Rahardjo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

In the framework of implementing regional development, integral to national development, the principle of regional autonomy and national resource regulations is implemented which provides opportunities for increasing democracy and regional performance to increase community prosperity. The problem faced by the provincial government in Sulawesi, which is a public institution, is the problem of budget allocation. Budget allocation is the systematic distribution of funds based on the entire budget owned by the provincial government to carry out development programs or activities to meet infrastructure. The aim of this research is to determine the influence of local original income, balancing funds, other legitimate income on regional expenditure in district/city governments in Sulawesi province. This research uses the dependent variable regional expenditure, while the independent variable consists of original regional income, balancing funds and other legitimate regional income.

The sample population in this study were districts/cities in Sulawesi Province. This research uses the Multiple Linear Regression Analysis method using data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (LRA APBD) which has been audited in Regencies/Cities in Sulawesi Province for 2019-2020. The number of observations in this research using Natural Logarithm data transformation was 122 samples.

The results of this research show that local original income (PAD), balancing funds, other legitimate regional income have a positive and significant effect on regional spending. The level of Original Regional Income (PAD) can be influenced by regional economic conditions, changes in balancing fund policies by the central government can affect regional financial stability and the influence of legitimate regional income sources on regional spending varies depending on the amount of income generated and the priority of expenditure. Determined by the local government.

Keywords: *Regional Expenditures, Balancing Funds, Other Legitimate Regional Income, Original Regional Income*

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi di daerah serta tata kelola sumber daya nasional dihormati untuk mengintegrasikan pembangunan daerah ke dalam pembangunan nasional. Prinsip ini memfasilitasi perbaikan kinerja di daerah serta demokrasi, sehingga bisa membuat standar hidup individu lebih baik. Otonomi daerah mengacu pada hak dan yurisdiksi hukum yang diberikan kepada suatu wilayah geografis tertentu untuk mengendalikan urusan dalam negerinya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi khusus penduduk setempat.

Samad dan Rita (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi logis, yaitu bahwa setiap daerah harus mampu memberdayakan diri, baik dalam aspek ekonomi, pembinaan sosial masyarakat, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

¹ Corresponding author

Permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi di Sulawesi adalah lembaga pemerintah mempunyai permasalahan alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah penyaluran dana secara sistematis berdasarkan seluruh anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi untuk melaksanakan program atau kegiatan pembangunan guna memenuhi infrastruktur.

Mardiasmo (2009) dalam bukunya "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah" membahas secara mendalam konsep dasar otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan PAD serta peran penting pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu kerangka yang dapat memahami bagaimana agen (individu atau kelompok yang bertindak atas nama pihak lain) bertindak atas nama prinsipal (pihak yang mempunyai kepentingan atau tujuan) dalam situasi dimana terjadi konflik kepentingan antara dua pihak. Di sektor publik pun, teori keagenan dapat membantu atau memahami dinamika antara pejabat publik atau yang disebut (agent) pegawai dengan stafnya dan (principal) dalam konteks masyarakat. Penggunaan teori keagenan telah banyak digunakan baik di sektor swasta maupun publik. Halim (2014) mendefinisikan keagenan sebagai pengaturan perjanjian antara prinsipal dan agen. Prinsip ini melibatkan agen untuk mewakili kepentingan mereka, namun kedua pihak memiliki preferensi dan tujuan yang berbeda. Teori keagenan berpendapat bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau lembaga dapat dipahami sebagai hubungan keagenan, dimana ikatan kontrak terjalin ketika masyarakat (prinsipal) memanfaatkan kontrak yang diberikan oleh pemerintah (agen).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. PAD mendukung pelaksanaan belanja daerah dan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sesuai dengan PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020. Dampak PAD terhadap investasi modal sangat besar karena peningkatan PAD meningkatkan belanja tidak langsung dan belanja langsung, terutama belanja modal yang merupakan bagian dari belanja langsung. Selain itu, pemerintah daerah dipengaruhi oleh desentralisasi karena memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan meningkatkan penerimaan keuangan daerah untuk membantu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum.

Pemerintah daerah dapat mendanai anggaran operasional dengan lebih efisien jika mereka berusaha meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan (Abdullah, 2002). Menurut penelitian Muttaqin et al. (2021), "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah", ada keterkaitan yang signifikan antara PAD dan belanja daerah. Penelitian ini dapat menawarkan berbagai teori yang relevan, seperti:

H1: Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja wilayah di kabupaten/kota di Sulawesi.

Dana Perimbangan

Melalui penggunaan Dana Kompensasi, PP No 55 Tahun 2005 memiliki tujuan untuk menghasilkan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana kompensasi mencakup alokasi dana dari pemasukan pajak dan sumber daya alam, hibah umum, dan hibah khusus. Menurut UU No 1 Tahun 2022, dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal, pendapatan tertentu, dan proporsi keluaran yang diberikan ke daerah produksi APBN.

Sebuah penelitian berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah" oleh Suardana et al. (2018) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif pada belanja daerah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis dijabarkan berikut ini:

H2: Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Sulawesi.

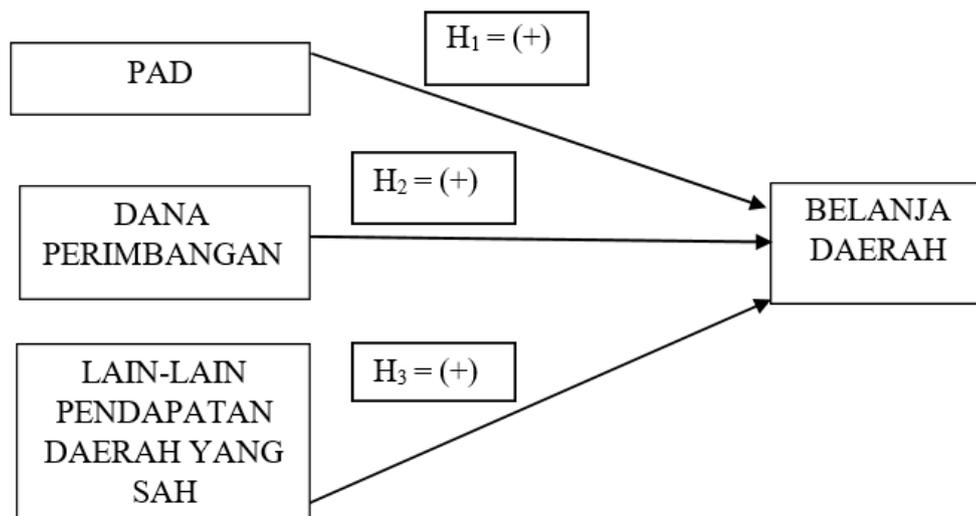
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tuntunan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020, bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana menganggarkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan pemerintah daerah yang tidak berasal dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah. Sulistyowati (2011) menyatakan bahwa potensi daerah memengaruhi sumber keuangan daerah; peningkatan signifikan pada pendapatan asli daerah yang dialokasikan pada APBD berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Fatmasari (2017) menyatakan bahwa pendapatan lain-lain yang sah memengaruhi belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis diuraikan berikut ini:

H3: Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi.

Gambar 1

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dua kategori variabel digunakan di studi ini: variabel independen dan variabel dependen. Pendapatan asal daerah, dana perimbangan, serta pendapatan sah daerah lainnya merupakan tiga variabel independen yang dipakai untuk riset ini. Selain itu, belanja daerah juga menjadi variabel dependen pada studi ini.

1. Pendapatan Asli Daerah

Data yang ditemukan dalam Laporan Pelaksanaan APBD Pemerintah Sulawesi selama tahun 2019-2020 menentukan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang dicatat dalam laporan operasional Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibandingkan untuk diketahui perbedaan pendapatan asli daerah. Ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang telah ditetapkan:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = L_n(\text{Total Pendapatan Asli Daerah})$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diaproksimasi memakai rumus logaritma natural (LN) dari jumlah PAD. Penggunaan LN bertujuan untuk membuat data penelitian yang memiliki satuan yang berbeda terdistribusi secara normal dan memungkinkan pengukuran menggunakan skala rasio yang lebih tepat.

2. Dana Perimbangan

Jumlah total Dana Perimbangan yang ditarik dari laporan operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran di Sulawesi Tahun 2019-2020 digunakan untuk menghitung variabel Dana Perimbangan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = L_n(\text{Total Dana Perimbangan})$$

Jumlah Dana Perimbangan diprosikan dengan menggunakan rumus LN Jumlah Dana Perimbangan. Tujuan menggunakan logaritma natural (LN) adalah agar data penelitian dengan berbagai nomor satuan dapat didistribusikan secara normal, dan skala dapat diukur dengan skala rasio.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan tambahan yang sah adalah variabel independen ketiga. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menghitung total Pendapatan tambahan yang sah yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Sulawesi selama tahun 2019-2020. Variabel ini dihitung dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah} = L_n(\text{Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah})$$

Pendapatan Lain-lain yang Sah diprosikan dengan rumus LN. Total Pendapatan Lain-lain yang Sah. Tujuan menggunakan logaritma natural (LN) adalah untuk memastikan bahwa data penelitian dengan berbagai satuan didistribusikan secara normal dan bahwa skala dapat diukur dengan skala rasio.

Populasi dan Sampel

Laporan Realisasi Anggaran atau yang disingkat menjadi LRA dipilih oleh peneliti untuk menjadi populasi pada studi ini ialah (LRA) Pemerintah Pusat di Sulawesi mulai tahun 2019-2020 atau 2 tahun yang terdiri dari 81 kabupaten/kota. Jumlah sampel yang perlu diolah ditentukan dengan menggunakan teknik judul penulis, *Purposive Sampling*.

Metode Analisis

Teknik analisis regresi linier berganda dilaksanakan dengan menjalankan pengujian analisis deskriptif pada riset ini. Pengujian autokorelasi, uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji t satu sampel, uji hipotesis klasik, dan uji korelasi pun juga dijalankan selanjutnya. Pengujian f, pengujian t, dan koefisien determinasi dipakai untuk menilai metode analisis linier berganda.

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

(Duwi, 2008)

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta

B₁-B₄ = Koefisien regresi untuk X₁, X₂, X₃

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

e = Standar Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Mengacu pada kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan sebelumnya, maka adapun sampel yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Prosedur Pilihan Sampel

No	Prosedur Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Kota/Kabupaten di Sulawesi yang telah diperiksa oleh BPK rentang tahun 2019-2020. Variabel-variabel yang tercakup meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Belanja Daerah.	162
2	Data <i>outlier</i>	40
3	Dalam Laporan Realisasi (APBD) Kota/Kabupaten di Sulawesi yang telah diperiksa BPK tahun 2019-2020. Variabel tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Belanja Daerah yang datanya tidak menggunakan data <i>outlier</i> .	122

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	122	19605.734782	5638960	287131.9995655737	801884.19191213150
Dana Perimbangan	122	392235	7347750	1000621.31147541	999695.706302103
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	122	8963.579146	8332610	384092.8540485245	1000530.83585722490
Belanja	122	11488.029857	12563400	1145213.2717139840	1712240.73905051070
Valid N (listwise)	122				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Pada tabel 2 analisis deskriptif yang telah tercantum pada tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai N berjumlah 122. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota/kabupaten di Sulawesi periode 2019-2020 mempunyai nilai rata-rata yang sebesar Rp 287.131.999.565,57 dengan standar deviasi sebesar Rp 801.884.191.912,13, nilai asli tertinggi Pendapatan Daerah (PAD) sebesar Rp563.896.000.000 sedangkan nilai terendahnya sebesar Rp19.605.734.782. Nilai rata-rata variabel dana perimbangan kota/kabupaten di Sulawesi periode 2019-2020 sebesar Rp1.000.621.311.475,41 dengan standar deviasi sebesar Rp999.695.706.302,10, nilai dana perimbangan tertinggi sebesar Rp7.347.750.000.000 sedangkan nilai terendah sebesar Rp392.235.000.000.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menjalankan penilaian terkait model regresi linier yang dipakai pada studi ini apakah memenuhi kriteria ataupun syarat yang diperlukan, maka dilaksanakan pengujian asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas merupakan contoh uji asumsi yang diperlukan.

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46550152
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.084
	Negative	-.181
Test Statistic		.181
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji normalitas menggunakan Uji Kolomogorov Smirnov nilai sig (p-value) yang ditampilkan di Tabel 3 di atas pada data residual yakni 0,200 berada di atas α (0,05). Oleh karena itu, residu disimpulkan mempunyai persebaran data yang normal.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

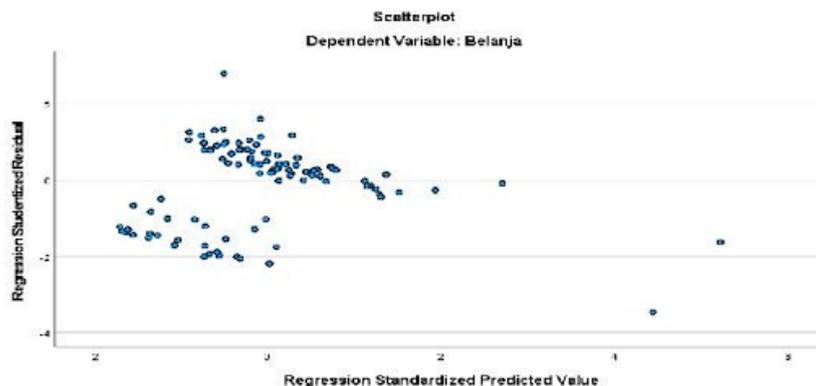
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.252	3.964
	Dana Perimbangan	.242	4.132
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	.898	1.114

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 4 di atas menunjukkan nilai VIF ketiga variabel berada di bawah 10. Maka kesimpulan dari hal tersebut yakni multikolinearitas tidak terdapat dampak pada variabel independen.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan scatter plot heteroskedastisitas pada Gambar 2 di atas menyajikan bahwa data residu terpencah secara acak serta tidak menghasilkan suatu bentuk pola spesifik. Dengan demikian kesimpulan yang terbentuk yakni pada residu tidak muncul heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Durbin watson	dU	4-dU	Keterangan
2,043	1,673	2,327	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Nilai Durbin-Watson seperti ditampilkan oleh tabel 5 di atas yakni 2,043. Diketahui penelitian ini mempunyai jumlah $n = 122$ dan variabel prediktor = 3 sehingga diperoleh dU sebesar 1,673. Jadi, jika kita membuat persamaan nilai $dU < d < 4 - dU$ menghasilkan $1,673 < 2,043 < 2,327$ hasilnya tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 6
Model Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	22.667	9.191	
	PAD	1.067	.269	.599
	Dana Perimbangan	3.422	.535	.987
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	.660	.150	.352

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan model regresi linier berganda di atas terlihat informasi bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan nilai belanja daerah sebesar 1,067, akibat naiknya dana perimbangan, belanja daerah pun naik sebesar 3,422 dan peningkatan pendapatan daerah lainnya yang sah dapat meningkatkan pendapatan daerah. pengeluaran berjumlah 0,660.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.566 ^a	.620	.303	1.48401	2.043

a. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, PAD, Dana Perimbangan
b. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Menurut hasil pengujian koefisien determinasi yang ditampilkan pada Tabel 7 sebelumnya, nilai Adjusted R-squared yang disesuaikan sebesar 0,303, atau setara dengan 30,3%, ditemukan. Nilai ini menampilkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekitar 30,3% dari variasi dalam belanja daerah. Aspek-aspek lain yang tidak ditampilkan dalam model regresi memengaruhi 69,7% dari total belanja daerah.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.533	3	40.844	18.546	.000 ^b
	Residual	259.871	118	2.202		
	Total	382.405	121			

a. Dependent Variable: Belanja

b. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, PAD, Dana Perimbangan

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Nilai sig (p-value) diperoleh sebesar 0,000, yang berada di bawah α (0,05), menurut hasil uji F yang diatas pada Tabel 4.8 di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan pendapatan daerah lainnya yang sah memiliki dampak yang signifikan secara bersama-sama terhadap belanja daerah.

Tabel 9
Hasil Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.667	9.191		2.466	.015
	PAD	1.067	.269	.599	3.962	.000
	Dana Perimbangan	3.422	.535	.987	6.400	.000
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	.660	.150	.352	4.398	.000

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Terdapat hasil uji yang disajikan pada uraian tabel 9 diatas. Uraianya berikut ini:

1. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi (p-value) variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah sebesar 0,008, yang berada di bawah tingkat signifikansi α (0,05), ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan belanja daerah. Maka dari itu, hipotesis penelitian pertama (H1) yang menghasilkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah dapat diterima.
2. Ada pengaruh yang signifikan dari dana perimbangan dan belanja daerah, menurut nilai signifikansi (p-value) variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah berjumlah 0,000 yang berada di bawah tingkat signifikansi α (0,05). Oleh karena itu, dapat diterima hipotesis penelitian kedua (H2) bahwa Dana Perimbangan memiliki dampak positif terhadap Belanja Daerah.
3. Dengan nilai signifikansi (p-value) variabel lain yang valid dari pendapatan daerah terhadap belanja daerah berjumlah 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi α (0,05), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel ini dan belanja daerah. Oleh sebab itu, dapat diterima hipotesis penelitian ketiga (H3) bahwa Pendapatan Daerah Lain yang Sah memiliki dampak positif terhadap Belanja Daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan memakai pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini, ditemukan hasil Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memicu belanja daerah secara positif. Oleh karena itu, jika Pendapatan Asli Daerah naik, maka daerah dan kabupaten di Sulawesi mungkin akan mengalokasikan lebih banyak uang untuk belanja daerah pada tahun 2019 dan 2020.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis menggunakan uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menampakkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin melonjak naik jumlah alokasi dana perimbangan, semakin meningkat pula jumlah belanja daerah yang akan dialokasikan oleh kota/kabupaten di Sulawesi pada periode 2019-2020.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Analisis menggunakan uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan daerah lain yang sah. Oleh sebab itu, pada periode 2019-2020, kota dan kabupaten di Sulawesi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan belanja daerah yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah lainnya yang sah.

KESIMPULAN

Dari temuan yang didapatkan pada studi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik yakni:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah merupakan hal yang signifikan. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu daerah. Ketika ekonomi daerah berkembang, potensi pendapatan daerah juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan belanja daerah. Penting untuk dicatat bahwa pengaruh PAD terhadap belanja daerah dapat bervariasi antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, bergantung pada factor-faktor seperti jenis sumber PAD, jumlah penduduk, struktur ekonomi daerah, dan efisiensi manajemen keuangan daerah.
- b. Dana perimbangan berdampak signifikan terhadap belanja daerah. Perubahan kebijakan dana perimbangan yang dilakukan pemerintah pusat dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Penting untuk diingat bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah dapat berbeda-beda tergantung pada jumlah dana yang diterima, kebijakan alokasi dana, karakteristik perekonomian dan sosial daerah, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti penyewaan aset seperti gedung pemerintah, tanah kosong, atau fasilitas lainnya. Pendapatan dari aktivitas sewa ini dapat digunakan untuk mendukung belanja daerah. Pengaruh pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah bervariasi tergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan dan prioritas belanja yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, manajemen yang baik dari seluruh sumber pendapatan tersebut oleh pemerintah daerah esensial untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, R (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 242-262.
- Badan Statistik keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. DJPK Kemenkeu (Diakses 26 Mei 2023) <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

- Elni (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, Vol 4 Nomor (2), 111.
- Erlina, & Mulyani, S. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen* (1ed.). Medan: USU Press.
- Ferdiansyah, Irfan, dkk. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Primbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, Hal 44-52.
- Ferdian (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 21, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2020. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25, Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Halim 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 (2022). Diambil dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, DPR (2004). Diambil dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). Indonesia Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*. (W. C. Kristiaji, Ed.). Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Masayu Rahma W, & Catur Martian, F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1 Nomor (1), 63-76

- Muttaqin, E.E. Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*. Vol (1) Nomor (1), 22-28
- Ni Made Arni A, & Ketut Alit S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 25 Nomor (2), 877-904
- Wikipedia (Diakses 26 Mei 2023) Daftar kabupaten dan Kota di Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020). Indonsia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 09 Desember (2005). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1985 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (1975). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/perpres-no-185-tahun-2014>
- Fatmasari (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Umrah*.
- Susilowati, D., Sitingjak, C. A. D., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Geo Ekonomi*, 12(1), 115-126.
- Sulistiyowati (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. H. (2015). *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*.